

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang sanksi bagi tindak pidana pornografi yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak serta peraturan yang lain yang mendukung tentang pemberian sanksi bagi tindak pidana pornografi secara khusus bagi pelaku yang melibatkan anak dalam kegiatan pornografi.
2. Adanya regulasi serta sanksi yang tegas bagi segala tindakan pornografi anak, perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak.

B. Saran-saran

Meskipun telah dikeluarkannya beberapa aturan mengenai tindak pidana pornografi, namun masih sangat diperlukan peran dari:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai sanksi yang tegas tentang tindak pidana pornografi.
2. Pemerintah bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dalam hal melakukan penindakan secara tegas terhadap bentuk-bentuk pelibatan anak dalam kegiatan pornografi.